

TATA KELOLA PUBLIKASI INFORMASI PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MELALUI DINAS KOMINFOTIK NUSA TENGGARA BARAT

Rani Karunia¹, Feri Irawan², Rahmad Hidayat³, Muhammad Aprian Jailani⁴
ranikarunia@gmail.com¹, ferirebbeleight@gmail.com², rahmathidayat22@yahoo.com³,
aprianjailani@ummat.ac.id⁴
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Untuk mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat di era modern, pemerintah daerah harus memberikan informasi secara cepat, akurat, dan interaktif. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tanggung jawab strategis untuk mengelola publikasi informasi pemerintahan melalui media sosial dan website resmi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tata kelola publikasi informasi oleh Diskominfo NTB. Penelitian ini menekankan penggunaan media digital, peran tim humas, dan masalah dalam penyebaran informasi publik. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskominfo NTB telah menerapkan strategi komunikasi publik yang fleksibel dengan membuat konten yang berbasis SOP, mengelola narasi digital yang komunikatif, dan menggunakan fitur interaktif di media sosial dan website. Namun demikian, masih ada beberapa masalah yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana memanfaatkan data analitik sebagai dasar evaluasi konten digital dengan benar, dan yang kedua adalah ketidak konsistenan dalam respons partisipasi publik. Untuk mendukung tata kelola komunikasi publik yang lebih inklusif, profesional, dan fleksibel di era digital, penelitian ini menyarankan peningkatan sistem kerja berbasis data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk kehumasan, dan pengembangan sistem respons publik yang terorganisir.

Kata Kunci: Administrasi Publikasi, Manajemen Informasi, Diskominfo NTB, Pelayanan Informasi Publik.

ABSTRACT

For support transparency and participation society in the modern era, government area must give information in a way fast, accurate, and interactive. The Communication, Informatics, and Statistics Service (Diskominfo) of West Nusa Tenggara Province has not quite enough answer strategic For manage publication information government through social media and official website. The purpose from study This is For evaluate governance publication information by Diskominfo NTB. Research This emphasize use of digital media, role public relations team, and issues in distribution information public. The method used is approach descriptive qualitative, and data collected through interview, observation field, and study documentation. Research results show that NTB Communication and Information Service has implementing communication strategies flexible public with make SOP based content, managing communicative digital narrative, and using feature interactive on social media and websites. However thus, still There is a number of problem that must be be noticed. The first one is How leveraging analytical data as base evaluation digital content with right, and the second one is inconsistency in response participation public. For support governance communication more public inclusive, professional and flexible in the digital era, research This recommend improvement system Work data driven, improvement capacity source Power man For public relations, and development system response organized public.

Keywords: Administration Publication; Management Information; Diskominfo NTB; Service Information Public.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mendorong perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam penyampaian informasi publik. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih adaptif dan transparan dalam mengelola serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat (Nugraha, dkk., 2022). Salah satu aspek penting dalam proses ini adalah administrasi publikasi, yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi informasi yang akan dipublikasikan kepada publik (Setyawati & Fitriati, 2023). Administrasi publikasi yang baik menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik dan menciptakan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif.

Dalam konteks pelayanan publik, digitalisasi juga telah membawa paradigma baru terhadap bagaimana pemerintah melayani masyarakat. Pelayanan publik tidak lagi hanya dipahami sebagai interaksi langsung antar individu, melainkan mencakup pula penyediaan informasi secara digital yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Pelayanan publik mencakup seluruh bentuk aktivitas yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus menjalankan mandat hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nababan, 2020). Oleh karena itu, kualitas pelayanan informasi menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pemerintahan. Ketika administrasi publikasi dilakukan secara sistematis, transparan, dan berbasis teknologi, maka hal ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas publik, tetapi juga mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, responsif, dan demokratis.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) memiliki tanggung jawab strategis dalam mengelola informasi pemerintahan. Diskominfo merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian, yang dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, informatif, dan partisipatif. Dalam konteks publikasi informasi, Diskominfo berperan sebagai penghubung utama antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui media komunikasi digital, penyebaran informasi kebijakan publik, serta pengelolaan opini dan aspirasi masyarakat. Melalui berbagai saluran digital seperti website resmi, media sosial, serta siaran pers, Diskominfo NTB berperan penting dalam memastikan bahwa informasi pemerintah dapat diakses secara luas, akurat, dan tepat waktu. Namun, dalam pelaksanaannya, publikasi informasi masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari koordinasi antarunit, keterbatasan sumber daya manusia, hingga belum optimalnya pemanfaatan data digital dalam mendukung evaluasi dan pengambilan kebijakan publikasi.

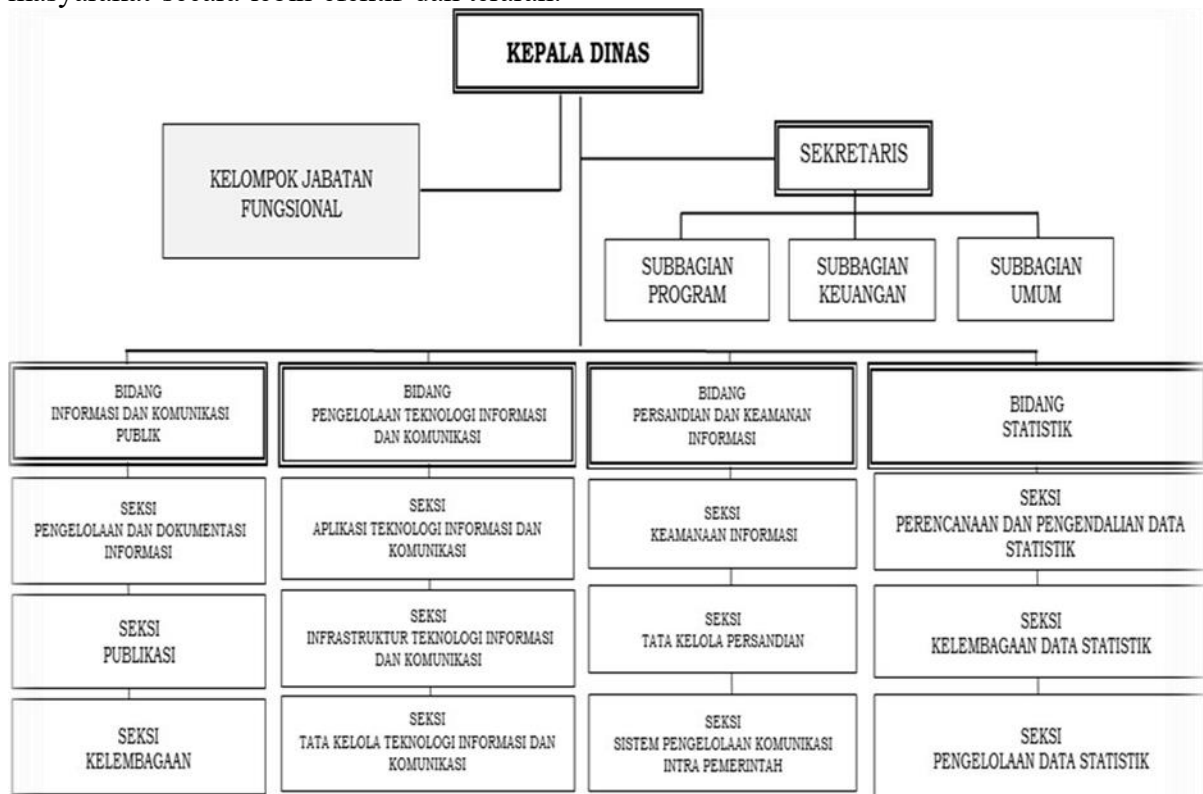
Untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan tepat waktu, diskominfo NTB memiliki peran strategis dalam mengelola informasi publik secara efektif dan efisien. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, teknologi informasi dan komunikasi digunakan. Ini sejalan dengan Priyatna dkk. (2020), yang menekankan betapa pentingnya untuk lembaga pemerintah mengoptimalkan teknologi informasi untuk komunikasi publik. Inovasi dalam pelayanan publik tidak hanya terkait dengan kecepatan penyebaran informasi, tetapi juga strategi komunikasi yang terbuka dan adaptif untuk berbagai sifat masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hidayat (2023), inovasi pelayanan publik mencakup tidak hanya kecepatan layanan tetapi juga strategi penyampaian informasi yang efektif, inklusif, dan sesuai dengan demografi audiens. Terbukti bahwa komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan audiens dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, melalui pesan komunikasi yang terarah, hubungan dengan media, dan pelibatan masyarakat, Diskominfo NTB membantu menciptakan citra yang baik tentang pemerintah. Menurut Undayah dkk. (2024), strategi kehumasan merupakan komponen penting dalam menentukan

citra organisasi daerah. Hal ini sejalan dengan gagasan Effendy (1990), yang menyatakan bahwa keberhasilan hubungan masyarakat di lembaga pemerintah ditentukan oleh komunikasi publik yang konsisten dan terbuka.

Dalam era digital saat ini, Diskominfo NTB dituntut untuk terus berinovasi dalam menyampaikan informasi kepada publik. Pemanfaatan media sosial dan platform digital lainnya menjadi sarana efektif untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Fatma, E., & Syahrani, (2024), pemanfaatan media sosial oleh dinas komunikasi dan informatika dapat meningkatkan efektivitas komunikasi publik dan memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.

Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2020. Struktur ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo secara optimal, terutama dalam hal pengelolaan komunikasi publik, pengolahan data statistik, serta pengamanan informasi melalui sistem persandian. Dengan struktur organisasi yang jelas dan terkoordinasi, Diskominfo NTB mampu menjalankan peran strategisnya sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat secara lebih efektif dan terarah.



Bagan Struktur Organisasi Diskominfo NTB (Diskominfo NTB, 2025)

METODE PENELITIAN

deskriptif kualitatif untuk menggambarkan tata kelola publikasi informasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) NTB. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan secara mendalam proses, strategi, serta tantangan dalam pengelolaan informasi publik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber dari Bidang IKP (Informasi dan Komunikasi Publik) Diskominfo NTB, serta observasi langsung selama proses magang.

Selain itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, termasuk konten yang diunggah pada website resmi Pemerintah Provinsi NTB, serta dokumen penugasan dan arsip publikasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan data dari media daring resmi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran yang akurat mengenai praktik publikasi informasi di lingkungan pemerintahan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Media Sosial oleh Diskominfo NTB

Media sosial telah menjadi jantung dari komunikasi publik modern yang menuntut kecepatan, interaktivitas, dan aksesibilitas. Di tengah pergeseran lanskap komunikasi dari konvensional ke digital, Diskominfo NTB secara progresif memanfaatkan media sosial sebagai saluran utama dalam mendiseminasi informasi kebijakan, program pembangunan, hingga dokumentasi kegiatan pemerintah. Platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter (X) digunakan secara aktif untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat, baik dari kalangan urban hingga rural, tua maupun muda, dengan pendekatan yang komunikatif, adaptif, dan visual.

Dalam praktiknya, akun Instagram @diskominfoNTB mengunggah beragam konten mulai dari agenda Gubernur, infografis data statistik, hingga liputan edukatif terkait literasi digital. Sementara itu, fitur Instagram Story digunakan untuk live report kegiatan pemerintah secara langsung. Fitur polling dan Q&A juga kerap dimanfaatkan dalam agenda sosial seperti NTB Gemilang, NTB Mall, dan layanan publik OPD mitra. Ini menunjukkan adanya integrasi fungsi komunikasi strategis dengan komunikasi pelayanan.

Pemanfaatan media sosial oleh Diskominfo NTB bukanlah sekadar formalitas institusional, melainkan bagian dari strategi komunikasi yang dirancang secara terstruktur. Setiap konten yang dipublikasikan dikembangkan melalui proses editorial internal yang mencakup perencanaan narasi, pemilihan visualisasi, pengemasan bahasa yang sesuai audiens, hingga pemilihan waktu tayang yang optimal. Dalam konteks ini, Tim Humas Bidang IKP berperan sebagai unit kreatif yang secara simultan memproduksi berita, dokumentasi audiovisual, serta membangun engagement melalui fitur-fitur interaktif media sosial seperti polling, Q&A, dan live streaming.

Guna menjaga kualitas dan konsistensi pesan komunikasi, Diskominfo NTB juga telah menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) publikasi informasi digital, yang mencakup pedoman penulisan berita, standar visual desain, serta alur koordinasi internal antarpegawai sebelum suatu konten tayang di platform resmi. Dengan adanya SOP tersebut, tim dapat bekerja lebih sistematis dan menghindari tumpang tindih peran, sehingga produksi konten menjadi lebih efisien dan seragam. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance dalam komunikasi publik, di mana profesionalisme dan standarisasi prosedural menjadi bagian tak terpisahkan dari pelayanan informasi pemerintah yang berkualitas.

Menurut Fatma & Syahrani (2024), pemanfaatan media sosial oleh lembaga komunikasi pemerintah dapat meningkatkan kedekatan antara pemerintah dan masyarakat, mengurangi jarak hierarkis, serta membangun citra instansi sebagai entitas yang responsif dan modern. Sementara itu, Armansyah (2023) menekankan bahwa media sosial menjadi representasi wajah digital pemerintah, sehingga penting untuk mengelolanya dengan prinsip profesionalitas, etika komunikasi, dan konsistensi pesan.

Lebih dari sekadar menyalurkan informasi, media sosial oleh Diskominfo NTB dijadikan sebagai wahana untuk membentuk opini publik yang positif dan menstimulasi

partisipasi aktif warga. Dengan mempublikasikan keberhasilan program pemerintah, menayangkan proses pelayanan publik secara transparan, serta membuka ruang klarifikasi terhadap isu-isu yang beredar, Diskominfo NTB telah mengadopsi prinsip *government public relations* (GPR) secara digital. Ini menciptakan relasi horizontal antara pemerintah sebagai penyelenggara dan masyarakat sebagai mitra pembangunan yang setara dan aktif dalam diskursus kebijakan.

Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya frekuensi dan volume interaksi publik, pengelolaan media sosial menuntut sistem kerja yang agile dan berbasis data. Tantangan seperti overload notifikasi, hoaks, dan pertanyaan berulang membutuhkan sistem respons yang cepat, terorganisir, dan berorientasi pada solusi. Tim Humas Diskominfo NTB mengakui bahwa dibutuhkan admin khusus yang terfokus di tiap platform agar pelayanan publik berbasis interaksi digital dapat dijalankan secara responsif dan merata. Dengan demikian, peran media sosial tidak hanya sebagai etalase digital pemerintah, tetapi juga sebagai kanal resolusi informasi publik yang kredibel dan terpercaya.

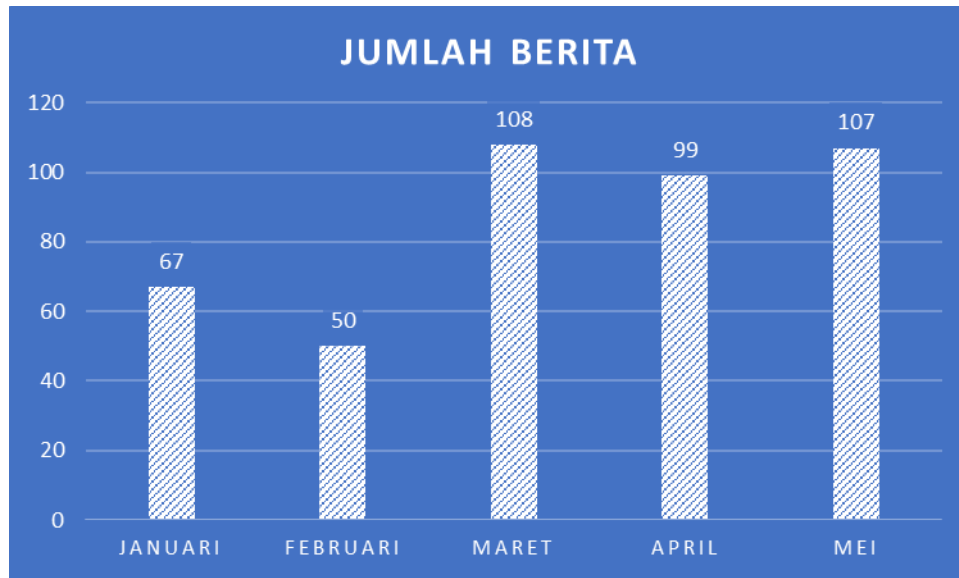
Pemanfaatan Website Resmi Pemerintah Provinsi NTB

Situs web resmi pemerintah merupakan tulang punggung informasi digital yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan media sosial. Jika media sosial berfungsi sebagai penyebar informasi cepat dan interaktif, maka website berperan sebagai arsip digital jangka panjang yang menyimpan informasi secara sistematis, terstruktur, dan dapat diakses secara permanen. Dalam hal ini, Diskominfo NTB mengelola situs web <https://ntbprov.go.id> sebagai kanal utama publikasi resmi yang mencakup berita kegiatan, pernyataan resmi, pengumuman publik, data statistik, hingga dokumentasi regulasi daerah.

Website resmi ini bukan hanya menjadi ruang bagi pemerintah menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas institusi kepada masyarakat. Diskominfo NTB secara aktif mengunggah konten berita ke dalam laman tersebut, yang disusun berdasarkan dokumentasi lapangan oleh tim humas, kemudian melalui tahap kurasi editorial, verifikasi data, dan approval dari pejabat terkait. Proses ini mencerminkan pendekatan administratif yang terstandar, yang menjamin akurasi, keabsahan, dan netralitas informasi yang dipublikasikan.

Berikut adalah data kuantitatif jumlah berita yang dipublikasikan oleh Diskominfo NTB di website resmi Pemerintah Provinsi NTB dalam kurun waktu 1 Januari hingga 4 Juni 2025:

Jumlah Berita yang Dipublikasikan di Website Resmi Pemerintah NTB (Januari-mei 2025).



Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa publikasi informasi berjalan sangat aktif, dengan lonjakan signifikan pada bulan Maret dan Mei. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas pemerintahan yang kemudian direspons secara cepat oleh tim publikasi Diskominfo NTB. Aktivitas ini menunjukkan bahwa website tidak hanya menjadi alat dokumentasi pasif, melainkan bagian dari ekosistem komunikasi publik yang aktif dan dinamis.

Website ini juga telah terintegrasi dengan sistem PPID, yang membuka akses kepada publik untuk mengajukan permintaan data atau dokumen publik sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sebagaimana dijelaskan oleh Yulisprianto & Aji (2018), situs web resmi pemerintah dapat menjadi indikator keterbukaan informasi apabila dikelola secara profesional, responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat, dan mudah diakses oleh semua kalangan. Dalam konteks Diskominfo NTB, website ini menjadi basis dari dokumentasi institusional sekaligus etalase kepercayaan publik terhadap transparansi pemerintahan daerah.

Tantangan dalam Administrasi Publikasi Informasi

Di tengah berbagai pencapaian yang telah diraih dalam hal publikasi informasi digital, terdapat sejumlah tantangan mendasar yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Diskominfo NTB. Ketiga tantangan utama tersebut saling berkaitan, yaitu: pentingnya konsistensi dalam merespons partisipasi publik, serta rendahnya optimalisasi pemanfaatan data analitik dalam proses evaluasi komunikasi publik.

1. Konsistensi Respons terhadap Partisipasi Publik

Salah satu kekuatan utama komunikasi digital adalah kemampuannya menjembatani dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, sistem respons yang belum optimal di Diskominfo NTB menyebabkan banyak interaksi publik seperti komentar, pertanyaan, bahkan pengaduan belum tertangani secara maksimal. Hal ini berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap niat pemerintah dalam membangun dialog partisipatif.

Menanggapi tantangan ini, menurut Lestari dkk. (2019), peningkatan profesionalisme dalam bidang hubungan masyarakat perlu didorong melalui pengembangan keterampilan, kesadaran terhadap kode etik, dan tanggung jawab profesi. Dalam konteks pengelolaan komunikasi publik oleh Dinas Kominfo Nusa Tenggara Barat, prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan melalui pembangunan sistem pengelolaan aduan dan interaksi publik yang berbasis teknologi informasi. Sistem ini memungkinkan respons yang lebih cepat,

terdokumentasi dengan baik, serta dapat dievaluasi secara berkala, sehingga membantu menjaga konsistensi dan kualitas tanggapan pemerintah terhadap partisipasi masyarakat.

2. Pemanfaatan Data Analitik sebagai Dasar Evaluasi

Evaluasi terhadap efektivitas komunikasi publik oleh Diskominfo NTB selama ini masih lebih mengandalkan penilaian kualitatif atau instruksi pimpinan. Padahal, media digital telah menyediakan berbagai perangkat analitik yang dapat memberikan gambaran kuantitatif atas performa setiap konten yang dipublikasikan, seperti jangkauan audiens (reach), tingkat interaksi (engagement rate), waktu tayang efektif (time performance), serta demografi pengguna.

Widya (2021) menegaskan bahwa komunikasi digital berbasis data (data-driven communication) merupakan pendekatan yang paling relevan dalam menghadapi era keterbukaan informasi. Dengan menganalisis data secara berkala, pemerintah tidak hanya dapat mengukur efektivitas strategi komunikasi, tetapi juga mampu memprediksi respons publik terhadap isu-isu tertentu serta menyusun konten yang lebih sesuai dengan preferensi audiens. Dengan kata lain, penggunaan data analitik merupakan fondasi menuju tata kelola komunikasi yang adaptif, efisien, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

KESIMPULAN

Tata kelola publikasi informasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat penting untuk memastikan bahwa informasi terbuka dan komunikasi publik berjalan dengan baik di era digital. Diskominfo mampu menyampaikan informasi kepada berbagai segmen masyarakat secara cepat, akurat, dan interaktif melalui pemanfaatan media sosial dan website resmi. Strategi komunikasi yang digunakan meliputi pembuatan konten berbasis Standar Operasi Prosedur (SOP), manajemen narasi digital yang komunikatif, dan menciptakan citra positif pemerintah melalui kanal-kanal resmi. Media sosial digunakan untuk mendorong partisipasi publik dan memperbaiki kebijakan publik, sementara website berfungsi sebagai lokasi untuk dokumentasi digital dan alat akuntabilitas.

Namun, untuk membuat komunikasi publik lebih responsif dan inklusif, diperlukan penguatan sistem kerja berbasis data, peningkatan kemampuan SDM humas, dan perbaikan mekanisme pengelolaan interaksi digital. Ini terutama karena tidak ada pemanfaatan data analitik dalam evaluasi konten digital dan konsistensi dalam respons partisipasi publik. Diskominfo NTB memiliki potensi besar untuk menjadi model institusi komunikasi publik yang profesional, terlibat, dan modern dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan adaptif dengan mengoptimalkan aspek strategis tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Nababan, S. (2020). Strategi pelayanan informasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi UPNYK*, 17(2), 166-180.
- Setyawati, D. N., & Fitriat, R. (2023). Digital Governance Dalam Keterbukaan Informasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 1978-0680.
- Lestari, Y. T., Setianti, Y., & Priyatna, C. C. (2019). Aktivitas Perhumas Indonesia Dalam Meningkatkan Profesionalisme Anggotanya Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea). *JRK (Jurnal Riset Komunikasi)*, 9(1), 91-112.
- Hidayat, R. (2023). Analisa Penerapan Sistem Merit Di Pemerintah Kota Mataram (Studi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2022). *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 9(2), 388-407.
- Effendy, O. U. (1990). Ilmu komunikasi teori dan praktek. Remaja Rosdakarya.

- Armansyah, F. (2023). Strategi Public Relations Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan dalam Meningkatkan Citra di Instagram dan Website (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Priyatna, C. C., Prastowo, F. A. A., Syuderajat, F., & Sani, A. (2020). Optimalisasi teknologi informasi oleh lembaga pemerintah dalam aktivitas komunikasi publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 114-127.
- Lestari, A. (2021). Strategi Komunikasi Humas Pemprov Jabar dalam Mensosialisasikan Program Desa Digital. *Reputation: Jurnal Ilmu Hubungan Masyarakat*, 5(3), 325-346.
- Yulisprianto, A. R., & Aji, G. G. (2018). Implementasi Government Public Relations Digital Untuk Membangun Komunikasi Dua Arah (Studi Kasus Program Sapawarga Pemerintah Kota Surabaya). *The Commercium*, 1(2).
- Fatma, E., & Syahrani, R. A. (2024). Pemanfaatan Media Sosial di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat sebagai Komunikasi Publik di Aceh Barat. *Jurnal Sosial Teknologi*, 4(8), 639-650.
- Rifky, Y. A., & Gusti, A. G. Implementasi Government Public Relations Digital untuk Membangun Komunikasi Dua Arah (Studi Kasus Program SAPAWARGA Pemerintah Kota Surabaya). *J. Mhs*, 3, 49-58.
- Undayah, V. I., Fitriyani, A. R., Maudunnajah, H., & Putri, I. (2025). Peran Dan Strategi Public Relation Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Serang Dalam Membangun Citra Instansi Daerah. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 158-166.
- Surtika, M., & Darwis, Y. (2024). Strategi Kehumasan Dalam Pelayanan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 1(3), 386-393.
- Widya, A. R. (2021). Meningkatkan Keterlibatan Publik secara Online pada Era Open Government di Media Sosial (Studi Analisis Isi Akun Instagram Badan Pusat Statistik) (Increasing Online Public Engagement In The Era of Open Government On Social Media (Content Analysis of Statistics Indonesia's Instagram)). *JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi*, 23(2), 185-198.